

KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL DI PEKANBARU

Oleh : Ambok Upek

Ambok.upek48@gmail.com

Pembimbing : Dr. Harapan Tua RFS, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR.Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The problem regarding the Illegal Cosmetics Circulation in Pekanbaru is interesting to discuss because I have seen that from the past year many business actors have started to appear selling various kinds of cosmetic products that are traded in Pekanbaru, The purpose of this study was to determine how far the supervision carried out by the POM Center in supervising the distribution of cosmetics in Pekanbaru. This research uses descriptive qualitative research methods through data collection techniques by means of observation, interviews and documentation in the form of pictures or tables The results of this study are based on the theory of Agus Dwiyanto which includes Productivity, Service Quality, Responsibility and Accountability. The informants in this study were the Head of the Pekanbaru City Drug and Food Control Center, the staff of the Food and Drug Administration for Research, Cosmetics Business Actors. , Society, Performance Implementation Center for Drug and Food Control has not run optimally as I see there are still many illegal cosmetic products circulating in Pekanbaru, the supervision carried out by the POM Center has not been maximally yet also found obstacles in the implementation of the supervision of illegal cosmetic products namely limited budget, unequal human resources, competence and quality of employees who are not evenly distributed

Keywords: Performance, Supervision, National Agency of Drug and Food Control

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi Khusus nya di Pekanbaru , obat asli Indonesia, makanan, kosmetik dan alat kesehatan. Melalui penggunaan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi berbagai produk dalam skala yang sangat besar dan luas di Pekanbaru. Dukungan kemajuan teknologi transportasi dalam perdagangan internasional pun membuat produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.

Konsumsi masyarakat Pekanbaru terhadap produk-produk tersebut cenderung terus meningkat, seiring dengan berubahnya gaya hidup masyarakat dan termasuk pola konsumsinya. Sementara itu, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Disisi lain, iklan dan promosi pun secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi produk-produk yang ditawarkan. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada kenyataannya meningkatkan resiko dan dampak yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Jika terdapat produk yang tidak memiliki standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar terutama bagi keselamatan masyarakat.

Kosmetik merupakan salah satu produk yang banyak dipakai oleh masyarakat. Kosmetik digunakan oleh masyarakat dengan tujuan agar si pemakai tampil percaya diri. Dengan tampil percaya diri, maka aktifitas masyarakat saat berhadapan dengan banyak orang menjadi lebih percaya diri. Produk-produk kosmetik yang banyak beredar dan

digunakan oleh masyarakat tersebut saat ini memiliki banyak jenis dengan berbagai pilihan merk. Banyak dari kosmetik yang beredar saat ini tidak memiliki izin dan mengandung bahan-bahan berbahaya seperti *mercury*, *hydroquinone*, *tretinoin* yang sangat berbahaya untuk digunakan. Bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia seperti kerusakan pada susunan syaraf, kerusakan ginjal, dan dapat menimbulkan penyakit seperti diare, iritasi kulit, dan kanker.

Produk-produk kosmetik dengan bahan berbahaya tersebut harus diwaspadai, karena jika masyarakat sebagai konsumen tidak cermat dalam memilih produk kosmetik maka akan berdampak pada kesehatan. Kesehatan merupakan faktor penting agar manusia dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari. Pengertian kesehatan berdasarkan UU RI Nomor. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Maka dari itu kesehatan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh manusia.

Ancaman penyakit yang ditimbulkan dari kosmetik-kosmetik yang ilegal mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat saat ini menjadi masalah yang serius, karena produk-produk kosmetik yang ilegal dan mengandung bahan berbahaya tersebut masih beredar bebas di pasaran. Peredaran kosmetik yang ilegal dan mengandung bahan berbahaya tersebut dapat dengan mudah ditemui di toko- toko kosmetik yang ada di pasar tradisional maupun swalayan. Masyarakat terkadang tidak selektif dalam memilih kosmetik yang akan dibeli. Keberadaan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) dalam upaya untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya tersebut

sangatlah penting. BBPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103/2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. BBPOM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan.

Pembentukan BBPOM ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM, tanggal 26 Februari 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 34/M.PAN/2/2001 Tanggal 1 Februari 2001. Setelah semua keputusan ini dikeluarkan, BBPOM menjadi badan yang ditujukan independensinya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di tengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam melakukan tindak pengawasannya, terdapat beberapa Produk yang diawasi oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) antara lain obat, produk biologi, narkotika dan psikotropika, obat tradisional, makanan dan minuman, suplemen makanan, kosmetik, zat aditif/rokok, serta bahan berbahaya.. Berdasarkan hasil pra riset peneliti pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM), tanggal 4 Desember 2018 didapatkan data bahwa pada tahun 2018 masih ditemukannya sarana/toko kosmetik yang menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti bahan pemutih, *hydroquinon*, dan *tritinoid*. Selain mengandung bahan yang berbahaya, kosmetik yang dijual di sarana/toko juga merupakan kosmetik tanpa izin edar (TIE) dari BBPOM.

Berdasarkan pasal 2 pada peraturan presiden nomor 80 Tahun 2017

Tentang salah satu tugas Balai Besar Obat Dan Makanan yakni menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan Obat dan Makan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas obat, bahan obat norkotika, psikotropika, obat tradisional, suplemen kesehatan , kosmetik dan pangan olahan dengan demikian Pengawasan kosmetik illegal merupakan salah satu target kinerja dari balai besar pengawasan obat dan makana terdapat didalam lakip, berdasarkan dari hasil laporan yang diperoleh bisa dilihat dari Indikator yang diukur dengan kriteria Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM, kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium dan kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan, Razia yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap sarana/toko, klinik/salon kecantikan tersebut dalam rangka meminimalisir angka peredaran kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya. Hasil razia tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukannya sarana/toko kosmetik yang menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Pada tahun 2019 juga masih ditemukan kosmetik berbahan berbahaya pada klinik-klinik kecantikan di Pekanbaru namun pihak BBPOM bersikap acuh terhadap temuan tersebut.

Dengan adanya permasalahan masih beredar luasnya kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya di toko dan klinik/salon kecantikan diatas, serta sikap BBPOM yang acuh dalam hal masih ditemukannya kosmetik berbahan berbahaya, maka perlu diadakannya penilaian sejauhmana kinerja BBPOM dalam melakukan pengawasan. Kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi.

Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering sekali dilanggar atau

tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi dalam kalangan dunia usaha yang menunjukkan terjadinya peredaran- peredaran produk obat-obatan yang membahayakan kehidupan manusia maka dari itu penulis terinspirasi untuk membahas mengenai perlindungan konsumen atas informasi obat yang beredar luas di pasaran sehingga saya menulis Skripsi yang berjudul **Kinerja Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Mengawasi Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Pekanbaru.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala yang penulis uraiandiatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagaiberikut:

1. Bagaimanakah kinerja Balai Besar Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru?
2. Faktor- faktor apa saja yang menghambat kinerja Balai Besar Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam mengawasi peredaran produk Kosmetik ilegal di Pekanbaru.

1. Untuk mengetahui kinerja Balai Besar Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran produk kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru.
2. Menganalisis Faktor- faktor yang menghambat kinerja Balai Besar Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan Kosmetik Ilegal di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai kinerja BBPOM Kota Pekanbaru dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal di Pekanbaru.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah khusus nya Pekanbaru

2 . KONSEP TEORI

2.1 Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Mahsun (2006:25) mengatakan Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Edison (2010:3) Kinerja merupakan suatu hasil dari suatu proses yang mengacu dan di ukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan sebelumnya, dan kinerja mencerminkan kemampuan dan keterampilannya dalam pekerjaan tertentu yang aka berdampak pada reward dari suatu organisasi atau perusahaan.

2.2 Kinerja Organisasi

Menurut Surjadi (2009:7) kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan

organisasi berarti kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkat sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang di sarankan pada tujuan yang sudah di tetapkan sebelumnya.

Menurut Mulyadi (2007: 337) Kinerja organisasi adalah keberhasilan personil tim atau organisasi dalam mewujudkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan.

Menurut Daft (2010) Kinerja organisasi adalah kemampuan untuk tugas organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya manusia, seluruh kekayaan, kapabilitas, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi serta pengetahuan yang dikendalikan perusahaan.

Menurut Baban Sobandi (2006:176) Kinerja organisasi adalah sesuatu yang telah di capai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact.

Menurut Agus Dwiyanto (2006:50) mengukur kinerja organisasi publik berdasarkan adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

1. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting dalam organisasi.
2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

3. Responsibilitas
Menjelaskan atau mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
4. Akuntabilitas
Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan dekriptif analisis, yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya, didasarkan hasil observasi yang dilakukan serta penelitian ini memutuskan pada deskriptif data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan pelaku yang diamati, data yang dihasilkan ini berupa fakta fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti Sugiono (2016:38).

3.2.LokasiPenelitian

Dalam penelitian ini penulis telah menetapkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) kota pekanbaru sebagai daerah penelitian, lokasi penelitian tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena penulis ingin mengetahui sistem kinerja yang dilakukan Balai Besar POM sudah berjalan efektif atau tidak. Karena pada kenyataannya masih banyak ditemukan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar.

3.3.Informan Penelitian

Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Informan adalah suatu istilah yang memberikan pengertian kepada subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi kepada peneliti. Dalam menentukan informan selanjutnya ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Maksud sampling dalam hal ini ialah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Dengan demikian tujuannya adalah menggali informasi yang ada menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul **Moleong (2005:152):**

Adapun yang menjadi informan penelitian ini antara lain:

1. Kepala balai pengawasan obat dan makana kota pekanbaru
2. Staff balai pengawas obat dan makanan yang berkaitan dengan penelitian
3. Pelaku usaha kosmetik
4. Masyarakat

3.4.Jenis Data

A. Data Primer

Data primer adalah Informasi yang diberikan langsung dari informan melalui wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, Serta mengenai indikator menentukan standar pengawasan, mengukur pelaksanaan yang telah dicapai, dan melakukan tindakan koreksi atau perbaikan atau sanksi terhadap pelanggaran tertentu.

B. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan tentang masalah yang diteliti yang diper dari kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) kota penkanbaru berupa : Gambaran Umum tentang Balai Besar POM Kota Pekanbaru, struktur organisasi Balai Besar POM Kota Pekanbaru, fungsi dan tugas setiap bidang Balai Besar POM Kota Pekanbaru serta data lain yang berkenaan dengan penelitian ini.

3.5. Teknik PengumpulanData

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan sekunder, dan tehnik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipan, wawancara mendalam, serta studi kepustakaan.

A. Observasi

Dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti mengenai pelaksanaan pengawas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam dukungan penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. beberapa informasi yang diperlukan dari hasil observasi adalah ruang (tempat), perilaku, objek, dan kejadian atauperistiwa.

B. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna mendapatkan data mengenai Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru

3.6. Analisis Data

Analisis data ini merupakan aktifitas penalaran dan pengamatan lebih luas mengenai gejala-gejala dan informasi dari hasil penelitian, data-data yang didapat dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut jenisnya lalu seterusnya peneliti menganalisa data dengan menggunakan metode analisa data kualitatif yaitu berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Setelah terkumpul

data-data tersebut dipisahkan sesuai dengan kelompokan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian. Namun, sebelum masing-masing teknik pemeriksaan diuraikan, terlebih dahulu ikhtisarkannya dikemukakan. Ikhtisar itu terdiri dari kriteria yang diperiksa engan satu atau beberapa teknik pemeriksaan.

Penulis dalam menganalisi data dilakukan dengan langkah langkah yang telah di tentukan sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik:

a. Wawancara

Interview atau wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (face to face), telepon atau media lainnya, maupun terlibat langsung dalam suatu kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan responden untuk memperoleh data mengenai Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Desa Rawa Mekar Jaya. Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur (unstructured) dan bersifat terbuka (openended) yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan maupun opini dari pada responden wawancara.

b. Observasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala gejala yang diteliti. Penulis akan melihat sendiri secara langsung bagaimana kondisi pelaksanaan program tersebut dengan bantuan data.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data administratif ataupun arsip dari kegiatan yang ditemui oleh peneliti dilapangan. Dokumen yang diteliti yaitu yang berhubungan dengan tugas informan sebagai bukti penelitian, berupa rekaman wawancara dengan yang diwawancarai.

d. Mereduksi data

berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya, Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

e. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang di temukan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, kesimpulan data yang dikemukakan di awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Proses Kinerja Pengawasan Balai Besar Obat dan Makan Pekanbaru

Kinerja Balai Besar Pengawasa Obat dan Makann Pekanbaru dalam Pengawasan Produk Obat dan Makanan pengawasan produk obat dan makanan ditentukan dari sejauh mana hasil kerja yang dapat dicapai oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan produk Kosmetik Ilegal di Pekanbaru. Pengukuran kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan tiga indikator yaitu indikator produktivitas, indikatorn responsivitas, dan indikator responsibilitas.

4.1.1 Produktivitas

Produktivitas Merupakan pengukuran kinerja yang mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan yang dikeluarkan oleh BPOM dalam pengawasan kosmetik Ilegal di kota pekanbaru agar tercapai tujuan yang telah di tetapkan, yang meliputi, Input (Sumber Daya Manusia,Sarana dan Prasarana), Output,Efisiensi Layanan , Efektifitas Layanan

Jika Produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu-bahan-tenaga) dan sisitem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari kemampuan dalam memproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan, seorang dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan kinerja sesuai yang telah di tetapkan.

4.1.2. Kualitas Layanan

Kulaitias Layanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Berorientasi pada pelayanan dan pemanfaatan sumber daya organisasi yang di keluarkan oleh Balai Besar Obat dan Makanan agar kualitas layanan organisasi dapat tercapai secara maksimal yang meliputi kepuasan masyarakat dan koordinasi antara sesama anggota Sesuatu tingkat layanan yang di terapkan Balai Besar POM berhubungan dengan terpenuhinya harapan dan kebutuhan pelanggan atau penggunaanya. Artinya pelayanan dikatakan berkualitas apabila suatu Organisasi menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan standara yang telah di tetapkan,umumnya kualitas pelayanan banyak digunakan sebagai dasar bagi produk jasa, karena inti produk yang dipasarkan adalah suatu kinerja yang berkualitas, dan kinerja tersebut yang nantinya akan dibeli oleh pelanggan. Oleh karena itu, kualitas kinerja pelayanan merupakan dasar bagi

pemasaran jasa. pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka dipersepsikan baik dan memuaskan. Kualitas Layanan Balai Besar POM Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kualitas Layanan Balai Besar POM Pekanbaru sudah cukup baik dalam rangka menampung, merespon, dan menindaklanjuti berbagai pertanyaan dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan masalah produk Kosmetik yang ilegal yang tersebar luas di Pekanbaru. dan kualitas layanan juga bisa artikan sebagai kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat layanan disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kualitas layanan dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena pelayanan secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki kualitas layanan rendah

dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4.1.3 Responsibilitas

Suatu paparan yang digunakan untuk pemberian makna adanya kewajiban moral dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada sekelompok atau seseorang. Hal ini memberikan konotasi adanya internalisasi dari suatu kewajiban atau rasa kepemilikan pribadi dari suatu penugasan. Gagal menyelesaikan penugasan dari kewajiban tersebut menjadi dasar dari adanya rasa malu dan bersalah apabila suatu tugas tersebut tidak selesai dan tidak tepat sasaran, dan Responsibilitas juga menjelaskan dan mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

4.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep etika atau pertanggung jawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi yang berkaitan dengan pengawas kosmetik ilegal oleh BPOM di kota Pekanbaru. merupakan konsep etika yang memiliki wewenang dalam mengatur dan menegerjakan tatanan administrasi yang telah disepakati bersama baik itu di dalam organisasi atau instansi, Ada pun kewajibannya harus melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.2 Faktor Penghambat Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Pengawasan Produk Kosmetik yang beredar luas di Pekanbaru.

Berbagai hambatan dialami oleh Balai Besar POM Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap produk Kosmetik ilegal di Pekanbaru, Hambatan yang

dialami oleh Balai Besar POM Pekanbaru dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia tidak sebanding dengan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi. Balai Besar POM Pekanbaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam hal pengawasan terhadap peredaran produk Kosmetik illegal masih kekurangan dari segi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki Balai Besar POM Pekanbaru tidak sebanding dengan besarnya cakupan pengawasan yang dilakukan. Dengan demikian, Balai Besar POM Pekanbaru belum bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap sarana produksi dan distribusi yang ada di Pekanbaru. Kompetensi dan kualitas pegawai Balai Besar POM Pekanbaru belum merata. Kompetensi dan kualitas pegawai Balai Besar POM Pekanbaru masih belum merata. Ada pegawai yang mempunyai kualitas dan kompetensi bagus, dan ada pula pegawai yang kualitas dan kompetensi kurang. Belum meratanya kompetensi dan kualitas pegawai ini menghambat kinerja pengawasan produk obat dan makanan. Artinya, pegawai yang mempunyai kompetensi bagus dalam hal melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi dapat menjalankan tugasnya secara cepat dan cermat. Sedangkan pegawai yang kompetensi kurang, belum dapat menjalankan tugas pengawasannya secara cepat dan cermat. Belum merata kompetensi dan kualitas pegawai ini juga menjadi hambatan bagi Balai Besar POM Pekanbaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan produk obat dan makanan.

2. Faktor Masih Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap dampak Produk Kosmetik Ilegal

Masih rendahnya pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan persyaratan cara produksi yang baik. Rendahnya pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan persyaratan cara produksi yang baik

merupakan faktor penghambat dalam kinerja pengawasan produk obat dan makanan. Rendahnya pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan persyaratan cara produksi yang baik akan mengakibatkan masih adanya produk Kosmetik illegal yang beredar luas.

3. Faktor Sanksi Hukum yang kurang tegas

Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar hukum tindak pidana bidang obat dan makanan. Sanksi hukum yang relatif rendah kepada pelanggar tindak pidana bidang obat dan makanan menyebabkan penegakan hukum yang dilakukan kepada para pelanggar menjadi tidak optimal. Putusan pengadilan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keuntungan finansial yang didapat oleh pelanggar. Hal ini menyebabkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggar sehingga masih ditemukannya produk Kosmetik illegal yang tersebar luar di Pekanbaru.

4. Faktor Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan penentu dalam pelaksanaan Proses pengawasan peredaran kosmetik illegal di Pekanbaru untuk, menjalankan segala kegiatan-kegiatan pengawasan peredaran kosmetik tidak sedikiagar target dan sasaran dan biaya yang diperlukan untuk langsung turun ke jalan dalam proses pengawasan, anggaran yang di butuh kan oleh pihak penindakan harus sesuai dikarnakan lokasi yang luas jadi sarana dan prasaran harus terjamin dalam pengawasan tersebut agar target dan sasaran yang di inginkan dapat tepat sasaran.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Balai Besar POM Pekanbaru dalam pengawasan produk Kosmetik illegal sudah baik namun belum maksimal dilihat dari

indikator yang ada yakni produktivitas, responsivitas dan responsibilitas yang diuraikan sebagai berikut.

1. Produktivitas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru belum maksimal dalam pengawasan produk Kosmetik illegal. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikator sasaran yang sudah memenuhi target yang direncanakan dan ada pula indikator sasaran yang belum memenuhi target yang direncanakan. Indikator sasaran yang sudah memenuhi target yang direncanakan antara lain sebagai berikut.

a. Jumlah sarana produksi dan distribusi Kosmetik yang diperiksa.

b. Jumlah produk Kosmetik yang disampling dan diuji.

c. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan.

d. Jumlah layanan informasi dan pengaduan. Sedangkan indikator sasaran yang belum memenuhi target yang direncanakan antara lain yaitu :

a. Proporsi Kosmetik yang memenuhi standar (aman, manfaat, dan mutu).

b. Proporsi Produk Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya..

c. Proporsi Produk yang di tawarkan tidak memenuhi standa yang berlaku.

Kualitas Layanan Balai Besar POM Pekanbaru sudah cukup baik dalam menampung, merespon, dan menindaklanjuti berbagai pertanyaan, dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan masalah produk Kosmetik illegal. Balai Besar POM juga sudah baik dalam menyusun program-program pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsibilitas Balai Besar POM Pekanbaru sudah cukup baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan/program terkait pengawasan produk Kosmetik illegal sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan

sudah sesuai dengan kebijakan organisasi. Hambatan internal dan eksternal dialami oleh Balai Besar POM Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk. Hambatan internal yang dihadapi yaitu sumber daya manusia tidak sebanding dengan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi serta kompetensi dan kualitas pegawai Balai Besar POM Pekanbaru belum merata. Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi yaitu masih rendahnya pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan persyaratan cara produksi yang baik serta rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar hukum tindak pidana bidang obat dan makanan.

2. Faktor penghambat yang dijumpai

Proses kinerja Balai Besar Pengawas Obat di Pekanbaru sudah cukup optimal dalam proses pengawasan peredaran Kosmetik illegal, tetapi proses kinerja yang dilakukan tentu memiliki hambatan-hambatan dalam kegiatan pengawasan tersebut adapun hambatan yang sering terjadi di biasanya Faktor Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, padahal setiap kegiatan yang dilakukan hal terpenting yang harus dipenuhi adalah SDM yang baik, agar semua proses kinerja bisa berjalan dengan baik, dan juga salah satu penghambat Balai Besar dalam Pengawasan produk-produk illegal di Pekanbaru adalah masih banyaknya pelaku usaha yang tidak sadar akan bahayanya menggunakan produk kosmetik illegal yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan terkadang pelaku usaha hanya memikirkan profit yang besar tanpa melihat resiko yang akan didapat oleh pelaku usaha lain dan konsumen yang menggunakan

produk tersebut, di harapkan pelaku usaha bisa menjadi cermin yang baik bagi masyarakat Pekanbaru agar terhindar dari produk-produk kosmetik illegal yang beredar di pasaran, dan semua kegiatan ini tidak terlepas oleh efek yang di buat oleh pelaku usaha, dengan adanya peraturan dan undang-undang mengenai peredaran kosmetik illegal maka pihak Balai Besar POM harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dan memberi kan arahan betapa bahaya nya akibat menggunakan produk kosmetik yang ilegal, dan memberi pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha agar pintar dalam memilih kosmetik dan bagi pelaku usaha harus bijak dalam menjual produk kosmetik nya agar menjadi cerminan yang baik bagi masyarakat, dan masyarat pun tidak memiliki efek jera dalam mencari dan menggunakan produk kosmetik yang banyak beredar di Pekanbaru, dan biasanya setiap kegiatan tidak terlepas dengan adanya anggaran, oleh karna itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan harus lebih di utamakan khusus nya bidang penindakan dan pengujian produk-produk kosmetik, dengan terpenuhinya anggaran yang sesuai dengan sarana dan prasaranan dalam kegiatan pengawasan peredaran produk kosmetik illegal di Pekanbaru makan hasil dari proses kegiatan pengawasan pun akan mencapai hasil yang telah di targetkan dan hasil yang di peroleh oleh Balai Besar POM dapat menjadi contoh yang baik bagi organisasi yang lain.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka untuk

memperbaiki kelemahan-kelemahan Balai Besar POM Pekanbaru dalam pengawasan produk Kosmetik illegal , dengan demikian saran yang diberikan meliputi beberapa hal berikut ini.

1. Balai Besar POM Pekanbaru sebaiknya selalu meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi dalam pengawasan produk Kosmetik illegal dengan cara meningkatkan kompetensi pegawai terkait kompetensi dalam hal pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kasus pelanggaran kepada seluruh pegawai Balai Besar POM Pekanbaru sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Perlu adanya pengawasan yang menyeluruh dan lebih ketat dari pihak Balai Besar POM Pekanbaru dalam pengawasan produk Kosmetik illegal dengan cara penguatan koordinasi pengawasan dengan instansi-instansi terkait dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten serta membuat undang-undang khusus yang spesifik tentang pengawasan obat dan makanan yang dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum, Balai Besar POM Pekanbaru diharapkan lebih tegas dalam melakukan penindakan hukum bagi para pelanggar dengan cara meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kepolisian dan kejaksaan serta memperkuat substansi tuntutan yang dilakukan oleh jaksa kepada pelaku pelanggaran sehingga dapat menghasilkan putusan pengadilan yang lebih tegas. Putusan pengadilan yang lebih tegas tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hukum tindak pidana bidang obat dan makanan.,Balai Besar POM Pekanbaru diharapkan lebih mengintensifkan dalam pemberian edukasi kepada produsen

maupun konsumen. Pemberian edukasi kepada produsen sebaiknya lebih intensif tentang peyuluhan petunjuk pembuatan obat dan makanan yang baik sehingga produsen mampu membuat produk obat dan makanan yang berkualitas dan bermutu tinggi tanpa harus menambah dengan zat-zat yang merugikan kesehatan konsumen. Sedangkan pemberian edukasi kepada masyarakat dimaksudkan agar masyarakat lebih memiliki kesadaran dan kepekaan dalam menilai dan memilih produk-produk yang beredar di pasaran

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baban Sobandi 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Kelembagaan Daerah*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Menurut Barnes, 2012. *Produktivitas kinerja orrganisasi*. Yokyakarta: BPF
- Daft 2010. *Manajemen kinerja*. Jakarta : Selemba Empat.
- Dessler Gazy. 2013. *Penilaian Kinerja*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dharma, 2012 *Sasaran Kinerja Organisasi*, Jakarta: Raya Grafindo
- Dwiyanto Agus 2006. *Mewujudkan Kinerja Organisasi Melalui Pelayanan Publik: pustaka pelajar*
- Edison 2010 *Kinerja Organisasi pengukuran Kinerja*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar
- Gibson, James 2011. *Organisasi Perilaku Struktur Dan Proses*. Jakarta: Erlangga
- Hasibuan, Melayu S.P 2008. *Organisasi dan Motivasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Keban Yeremias T. 2004. *Sterategi administrasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Mangkunegara 2001. *Evaluasi kinerja SDM*. Bandung: Mansun, 2016.
- Pengukuran Kinerja*. Yogyakarta: BPF..
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Organisasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian kinerja*. Jakarta : Selemba Empat.
- Nasucha Craizi. 2012. *Kinerja Organisasi*. Bandung : Reflika Aditama.
- Sinambela. 2012. *Tujuan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sutrisno 2013 *Pengukuran Kinerja atas capaian Organisasi* PT. Rafika. Yogyakarta: UGM Press.
- Stolovitch and Keeps 1987. *Handbook of Human Performance Problem in Organization*. San Francisco : Jersey Bass Publisher.
- Surjadi 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung : Reflika Aditama.
- Tangkilisan Hessel Nogi 2005. *Manajemen public*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasaran Indonesia.
- Whittaker 2012. *Sterategic Planning and Management*. Unitet States: Lexington Book.
- Wibowo. 2011. *Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada